

# POSISI DAN PERAN JEPANG DALAM MEWUJUDKAN INTEGRASI REGIONAL DI ASIA TIMUR

Syamsul Hadi dan Shanty Dharmastuti

## Abstract

*This paper explains Japan's position and role in the dynamic aim of the integration of East Asia (North East and South East Asia), and aims to discover Japan's position and role as far as giving shape to regionalism in this region, especially after the Asia Crisis. It also discusses several background factors in Japan taking on the role of establishing an "East Asian Community." This paper then is divided into five parts: first, background issues which raised Japan's role in the regional crisis. Second, several of Japan's efforts in bringing the Asia crisis to an end through the establishment of AMF, New Miyazawa Initiative, and Chiang Mai Initiative. Third, Japan's position in the region of East Asia countries through the establishment of the FTA. Fourth, the interests of the Japanese nation in establishing East Asian economic community. The final part, conclusion by covering contributions which can be given by Japan and the importance which can be reached for in the process of establishing an "East Asian Community."*

*Keywords: community, economy, integration, regionalism, East Asia, Japan*

## Pendahuluan

Dalam konferensi Internasional bertajuk "Masa Depan Asia" yang diprakarsai oleh surat kabar *Nihon Keizai Shimbun* bulan Juni 2004, muncul sebuah wacana tentang pembentukan "Komunitas Asia Timur," yang bukan hanya perwujudan integrasi ekonomi dan perdagangan, tetapi juga suatu integrasi yang akan membawa bangsa-bangsa di kawasan ini mencapai kemakmuran dan perdamaian. Dalam kesempatan yang sama, mantan Perdana Menteri (PM) Jepang Nakasone Yasuhiro, secara lebih spesifik mengusulkan pembentukan "Masyarakat Asia Timur" yang terdiri dari negara-negara Asia Timur Laut dan Tenggara<sup>1</sup>.

Bila kita cermati dengan baik, nampak bahwa perkembangan regionalisme di Asia Timur meliputi peningkatan hubungan ekonomi dan politik, serta munculnya lingkungan ekonomi dan politik internasional yang baru pasca Perang Dingin. Pertumbuhan integrasi di Asia Timur merupakan akibat dari tiga bentuk gelombang transformasi perdagangan dan industri:<sup>2</sup> (1) munculnya Jepang sebagai kekuatan industri utama pasca Perang Pasifik; (2) adanya *newly industrialising economies* (NIEs) meliputi negara-negara Asia Timur

Laut dan Asia Tenggara pada akhir tahun 1970-an dan 1980-an, dan; (3) pertumbuhan ekonomi Cina yang pesat.

Asia Timur merupakan *home base* bagi perekonomian Jepang, terutama sejak terjadinya apresiasi nilai mata uang Yen di akhir tahun 1980-an. Hal ini ditandai dengan berkembangnya jaringan bisnis dan industri di wilayah Asia Timur, yang menunjukkan peningkatan orientasi perusahaan ke luar Jepang. Agar dapat mengelola jaringan bisnisnya secara efektif, integrasi Asia Timur menjadi sangat penting bagi Jepang, dan kunci utama menuju integrasi itu adalah dengan mendorong liberalisasi perdagangan dan investasi, meningkatkan kompetisi pasar, dan kerja sama ekonomi.<sup>3</sup> Salah satu kerja sama ekonomi yang harus dibentuk adalah pembentukan *Free Trade Agreement* (FTA) untuk menghadapi globalisasi ekonomi.

Pada periode pasca-perang, para akademisi dan politisi Jepang secara aktif berusaha menciptakan institusi ekonomi regional. Mereka antara lain menjadi aktor penting dalam pembentukan *Asian Development Bank* (ADB), kemudian bersama-sama dengan ASEAN mengembangkan kerja sama ekonomi dan politik diantara negara kapitalis dan komunis di Asia Tenggara pada tahun 1970-an, dan aktif dalam pembentukan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). Perwujudan institusi ekonomi regional Asia Timur akan memperkecil kemungkinan terjadinya konflik di wilayah tersebut, yang dapat mendorong perkembangan ekonomi dan politik di masa yang akan datang.<sup>4</sup> Kontribusi Jepang di Asia Timur diantaranya adalah kebijakan pemerintah Jepang memberi bantuan kepada negara-negara berkembang melalui *Official Development Assistance* (ODA), dan bantuan *technical assistance* dalam bentuk *'soft' aid*. Secara tidak langsung, bantuan-bantuan itu merupakan "pengawasan" Jepang terhadap pembangunan di negara-negara Asia Timur.

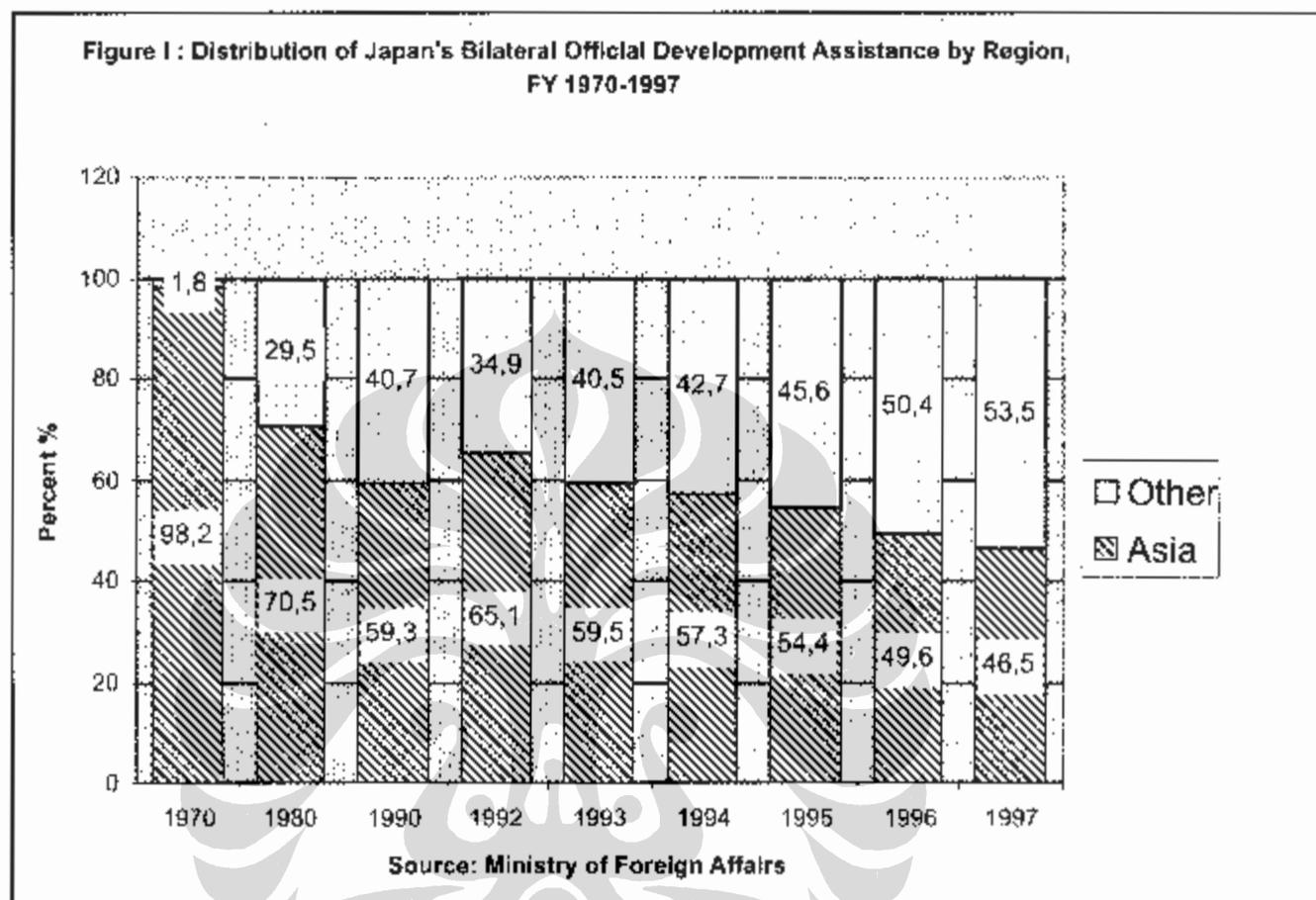
### Jepang dan Krisis Ekonomi Regional

Pada permulaan 1990, Jepang muncul sebagai negara donor terbesar didunia, dengan tanggung jawab internasional yang terus meningkat. Ketika Asia Timur mengalami krisis keuangan, Tokyo mulai memainkan peranannya sebagai anggota masyarakat global yang baik dan membuat strategi bagi kawasan regionalnya. Meskipun demikian, dengan situasi perekonomian yang cukup sulit, dukungan domestik terhadap bantuan luar negeri terus melemah, dan dari tinjauan serta pendapat publik, terlihat sorotan negatif terhadap program bantuan Jepang.

Atas inisiatif Asia, Jepang setuju membantu Thailand guna membangun suatu mekanisme penyediaan dana regional, dengan menggunakan institusi keuangan diantara negara-negara sekawasan. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut adalah<sup>5</sup> (1) adanya ketakutan krisis yang terjadi di Thailand dapat menyebar, (2) kalau negara-negara Asia lain mengalami krisis yang sama, tidak mungkin *International Monetary Fund* (IMF) dapat menjamin kecukupan dukungan dana di kawasan, (3) negara-negara Asia yang terkena krisis lebih mengutamakan kepentingan politik dan ekonomi domestik, padahal Jepang berkepentingan besar atas stabilitas ekonomi kawasan.

Program bantuan Jepang merupakan salah satu usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan citra Jepang tahun 1920-1930-an di kawasan Asia. Program ODA sebagai salah satu kunci kebijakan luar negeri, akan menjadi alat yang efektif untuk memperkuat kedudukan geopolitik Jepang apabila dapat membantu pembangunan di negara penerima.<sup>6</sup> Berikut ini grafik yang menggambarkan distribusi dari ODA Jepang.

Grafik 1



Tabel di atas menunjukkan bahwa pada saat krisis melanda Asia, distribusi ODA ke wilayah Asia mengalami penurunan karena ekonomi domestik Jepang pun tidak terbebas dari krisis. Meskipun demikian, krisis ekonomi Asia mendorong Jepang untuk memainkan peranan penting dalam membangun sebuah mekanisme baru bagi Asia Timur melalui kebijakan-kebijakan, termasuk didalamnya bantuan ekonomi. Melalui konsep *Asia Monetary Fund* (AMF) yang diajukannya, Jepang berniat membentuk suatu institusi regional untuk memperkuat stabilitas ekonomi Asia.

Selain hal-hal di atas, gagasan pembentukan institusi regional juga didorong oleh kegagalan IMF menyelesaikan krisis Asia dengan baik. Kritik atas kebijakan IMF di Asia Timur dilatarbelakangi oleh beberapa hal; *pertama*, adanya kesalahan IMF dalam mendiagnosa permasalahan krisis yang terjadi. Kesalahan ini mengakibatkan rendahnya inflasi dan meningkatnya surplus di Asia Timur, tetapi perusahaan-perusahaan yang ada semakin besar hutangnya. Selain itu, dampak kesalahan IMF ini terus menyebar ke seluruh negara di Asia Timur. *Kedua*, adanya kebijakan "restrukturisasi" yang mengakibatkan IMF hanya memperhatikan peran dan tugasnya dalam mengurangi pengeluaran keuangan tetapi tidak membenahi struktur perekonomian. Khususnya di Indonesia, kehadiran program-program

IMF justru dibarengi dengan kerusuhan atau kekacauan di bidang politik dan sosial yang semakin hari semakin meningkat.<sup>7</sup>

Konsep mengenai AMF di atas dibicarakan pertama kali saat pertemuan menteri keuangan di *ASEAN-European Meeting (ASEM)*, September 1997. Menteri-menteri keuangan dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand, mendukung ide pembentukan AMF ini, tetapi mendapatkan perlawanan keras dari Amerika, Cina, dan IMF. Dalam *Manila Framework* pada bulan November tahun yang sama, konsep institusi moneter regional akhirnya ditanggguhkan. Alasan mengapa proposal Jepang tersebut ditanggguhkan, masih belum diketahui, tetapi menurut Kikuchi Tsutomu<sup>8</sup> hal yang melatarbelakanginya yaitu (1) semakin besarnya dukungan negara lain di wilayah Asia terhadap konsep AMF Jepang. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa IMF suka mencampuri urusan dalam negeri orang lain, yang tampak dalam persyaratan pemberian pinjaman. Jepang tampaknya telah mengantisipasi penolakan AS dan negara-negara lain, sehingga pada garis besar proposal AMF yang dipresentasikan pada September 2002, disebutkan bahwa asumsi peminjaman akan diimplementasikan bersama dengan prinsip IMF; (2) adanya masalah kelembagaan, dimana terbentuk dan beroperasinya AMF sebagai suatu lembaga baru akan memaksa IMF melakukan penyesuaian-penyesuaian. Jadi, pembentukan lembaga baru di masa depan akan memperlemah jalur pinjaman lewat IMF. Hal inilah yang mungkin menjadi alasan utama mengapa AS tidak menyetujui konsep AMF tersebut.<sup>9</sup>

Setelah pembentukan AMF gagal, maka pada bulan Oktober 1998 Jepang membentuk "New Miyazawa Initiative" yang diprakarsai oleh Miyazawa Kiichi. "New Miyazawa Initiative" ini lebih berfokus pada bentuk kerja sama bilateral, tidak seperti konsep AMF yang bersifat regional. Ada dua hal penting yang menjadi perhatian dalam inisiatif ini, yaitu: *pertama*, penggunaan secara aktif pendanaan sektor swasta untuk menjamin perbaikan ekonomi negara-negara yang terkena krisis, di sini termasuk adanya usaha Bank Ekspor Impor Jepang untuk memudahkan pengumpulan uang dari negara-negara Asia di pasar modal internasional. *Kedua*, membangun sebuah sistem pengumpulan uang regional yang sehat dan stabil guna menghadapi krisis mata uang di masa yang akan datang.<sup>10</sup>

Masih berkaitan dengan krisis mata uang yang terjadi kawasan Asia, pada bulan Mei 2000 dalam pertemuan menteri-menteri keuangan 10 negara ASEAN plus Jepang, Cina, dan Korea Selatan (ASEAN+3) di Chiang Mai, Thailand menghasilkan *Chiang Mai Initiative*. Inisiatif ini bertujuan membentuk suatu jaringan *Currency Swap Arrangement* di kawasan Asia Timur. Saat itu, Jepang sudah siap menandatangani *swap agreement* dengan Korea Selatan (\$ 7milyar), Thailand (\$ 3milyar), Malaysia (\$ 3,5milyar), dan Filipina (\$ 3milyar).<sup>11</sup>

Krisis keuangan Asia memberikan dampak yang cukup berarti kepada para pembuat keputusan di Jepang. Mereka mengakui adanya interdependensi antara Jepang dengan

beberapa negara di Asia, dan bahwa integrasi Jepang ke dalam regionalisasi Asia akan semakin memperbesar pasar dan memperbaiki perekonomiannya.

## Posisi Jepang di Kawasan Regional Asia Timur

### 1. Ekonomi dan Perdagangan

Penurunan pertumbuhan ekonomi Jepang pada tahun 1990 mengakibatkan dua hal: *Pertama*, peran Jepang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi di Asia Timur melalui investasi dan perdagangannya pada tahun 1980-an, mengalami penurunan. Akibatnya, beberapa negara Asia Timur mengembangkan pasar ekspornya dan mencari investor luar negeri baru; *Kedua*, menurunnya peran Jepang mengakibatkan porsi negara-negara non-Jepang menjadi lebih besar dalam pertumbuhan *Gross Domestic Product* (GDP) Asia Timur, contohnya Cina.<sup>12</sup>

“Hubungan ekonomi antara Jepang dan Asia Timur sangat mendalam dan saling memberi, dan ekonomi merupakan hal yang penting saat ini yang memungkinkan untuk membayangkan bagaimana sekelompok negara di satu sisi dapat merasakan stabilitas kemakmuran, sementara sekelompok lainnya tidak merasakan hal tersebut,” ungkap Imai Takashi, Ketua *Keizai Koho Center*, untuk menggambarkan perubahan baru yang cukup dramatis dalam perdagangan Jepang dari perdagangan tradisionalnya dengan Amerika.<sup>13</sup> Penanaman modal Jepang ke Asia Timur terjadi dalam tiga gelombang. Gelombang pertama adalah Taiwan, Singapura, dan Hongkong, gelombang kedua adalah Malaysia dan Thailand, dan gelombang ketiga, Filipina, Vietnam dan Cina. Dari sinilah integrasi perekonomian Asia, terutama Asia Timur, menjadi kepentingan vital Jepang, dan menjadi semacam “Japan Incorporated” dalam pengertian regional. Sejalan dengan hal itu, pemerintah Jepang saat ini sedang mempromosikan visinya di Asia timur dengan mendorong sebuah pembangunan perdagangan yang integratif di Asia Timur.

Ekspor Jepang ke Asia Timur meningkat sebesar 40% pada tahun 2001. Demikian juga ekspor negara-negara Asia Timur ke Jepang meningkat sebesar 40% pada tahun 2001. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan interdependensi ekonomi di wilayah Asia Timur. Selain Jepang, pada awal tahun 1980-an Hongkong, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan juga menjadi investor utama di negara-negara berkembang di Asia Timur.

Sejak semula Jepang mengikuti dan berusaha mencari keuntungan dari kebijakan perdagangan di bawah *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT). Awal tahun 1990-an, ketika menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), Jepang mulai mencari jalur liberalisasi perdagangan di wilayah Asia Pasifik. Kebijakan perdagangan Jepang mengalami perubahan dari *one-track approach* yang berdasar pada kerangka perdagangan multilateral GATT/WTO (World Trade Organization) menjadi *two-track approach*, dengan menggunakan *global* dan *regional approach*. Kemudian, pada akhir tahun 1990-an, kebijakan perdagangan Jepang berkembang dari *two track approach* menjadi *multiple-track approach*, yang dimulai dengan pembentukan *Regional Trade Arrangement* (RTA). Jepang mulai membicarakan kemungkinan pembentukan FTA

dengan beberapa negara termasuk Singapura, Korea, Mexico, Chile pada akhir tahun 1990-an.<sup>14</sup>

Beberapa faktor yang melatarbelakangi Jepang mengganti kebijakan perdagangan Jepang dari *single-track approach* menjadi *multiple-track approach*.<sup>15</sup> adalah: *Pertama* dan yang terpenting, para pembuat keputusan di Jepang menyadari pentingnya liberalisasi perdagangan untuk merevitalisasi perekonomiannya yang meliputi fiskal, finansial, dan bidang-bidang lain, sebagai akibat dari resesi ekonomi yang berkepanjangan. Liberalisasi perdagangan dapat berperan sebagai katalis dalam perbaikan ekonomi. *Kedua*, Jepang melihat FTA memberi kesempatan bagi perusahaan-perusahaannya untuk berbisnis dengan negara-negara anggotanya. *Ketiga*, FTA akan memajukan pertumbuhan ekonomi, baik negara-negara di kawasan Asia Timur maupun Jepang sendiri. *Keempat*, Jepang tertarik pada FTA agar dapat secara kolektif memberikan kontribusi pada proses pembuatan peraturan di WTO.

Dalam hubungan ekonomi dengan negara-negara di Asia, Jepang membentuk beberapa FTA dengan beberapa negara diantaranya Jepang-Singapura, Jepang-ASEAN (dalam proses rintisan), Jepang- Korea, serta FTA Jepang-Korea-Cina.

### 1.1. FTA Jepang - Singapura

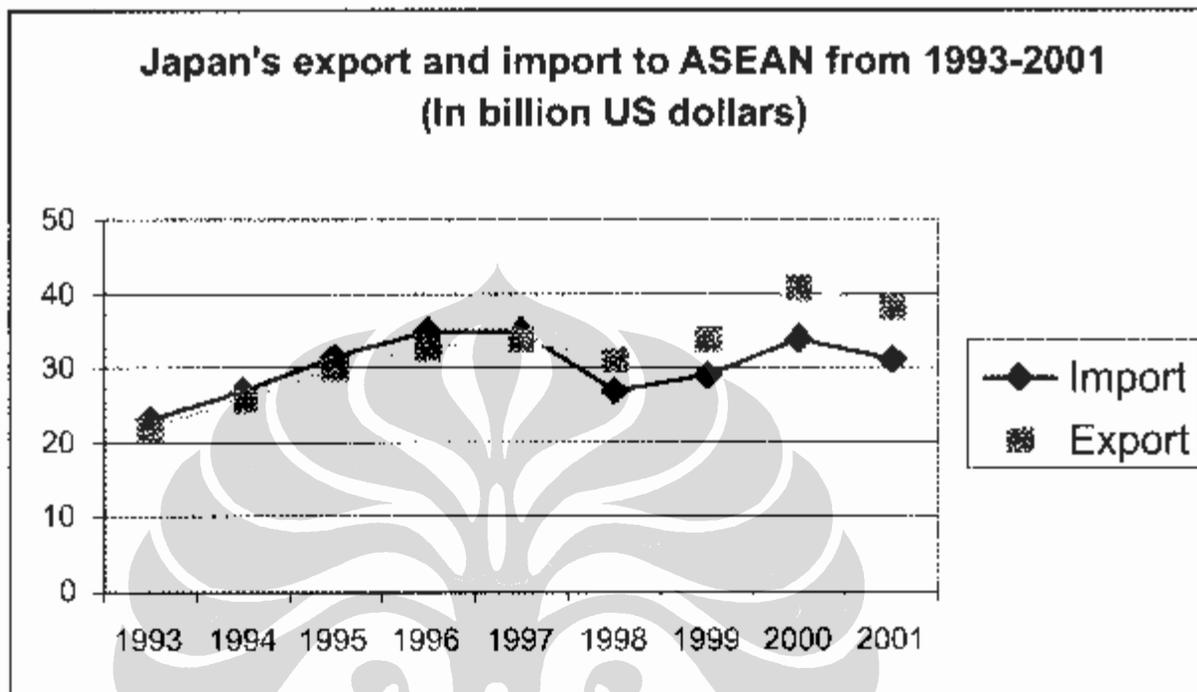
Jepang pertama kali membentuk FTA dengan Singapura pada tanggal 13 Januari 2002, ketika Koizumi menandatangani persetujuan dengan Singapura untuk membentuk "*New-Age Economic Partnership*". Pada tanggal 14 Januari, Koizumi juga mengeluarkan suatu pernyataan tentang "*Japan and the ASEAN in East Asia: A Sincere and Open Partnership*" yang menggambarkan kebijakan diplomatik Jepang terhadap Asia Timur.<sup>16</sup> Kebijakan Jepang terhadap Asia Tenggara ditegaskan kembali melalui Doktrin Koizumi yang menekankan pada ide "bertindak bersama dan maju bersama" sebagai kerja sama yang tulus meliputi: 1) perbaikan dan peningkatan kemakmuran, 2) penguatan kerja sama demi terciptanya stabilitas, 3) kerja sama yang menekankan pada prospek di masa yang akan datang.<sup>17</sup>

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi Jepang memilih Singapura menjadi partner FTA pertamanya. *Pertama*, tingkat perkembangan ekonomi Singapura lebih maju dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. Bagi Jepang, Singapura adalah pasar ekspor terbesar ketujuh, sumber impor terbesar ketujuh serta negara terbesar kelima tujuan investasi. Tujuan FTA Jepang-Singapura adalah mengurangi tarif serta memperbaiki prosedur perdagangan.<sup>18</sup> *Kedua*, Singapura bukanlah produsen pertanian yang merupakan komoditas sensitif bagi konstituen politik dalam negeri Jepang. Dukungan para petani terhadap *Liberal Democratic Party* (LDP) sebagai elemen inti dalam pemerintahan akan menyurut bila pemerintah meliberalisasi sektor pertanian termasuk memperbesar keran impor untuk produk-produk pertanian, khususnya beras.

### 1.2. FTA Jepang-ASEAN

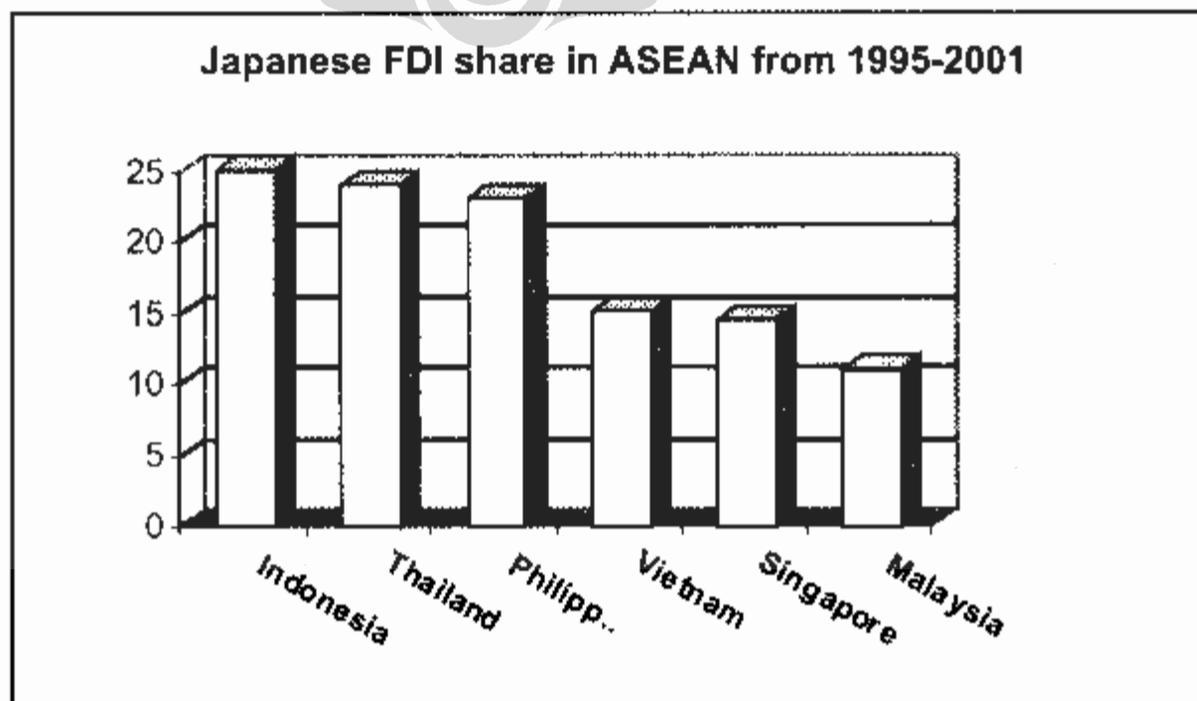
Jepang merupakan partner perdagangan terbesar kedua setelah AS bagi ASEAN. Selama tahun 1993-2001, perdagangan Jepang-ASEAN atau sebaliknya mencapai 15%. Jepang menyumbangkan sekitar 18,4% dari total *Foreign Direct Investment* (FDI) yang masuk ke ASEAN pada tahun 2001. Investasi Jepang memainkan peranan penting dalam pengembangan industri manufaktur modern di ASEAN.<sup>19</sup> Grafik-grafik di bawah ini menggambarkan data statistik kegiatan ekspor-impor, dan investasi Jepang ke ASEAN.

Grafik 2



Grafik 2 di atas menunjukkan terjadinya peningkatan ekspor Jepang ke ASEAN sebesar US\$ 40 milyar pada tahun 2000, dan penurunan yang tidak terlalu signifikan pada tahun 2001. Sedangkan impor, mengalami penurunan sebesar US\$ 20,5 pada tahun 1997-1998 yang disebabkan oleh terjadinya krisis Asia.

Grafik 3



Note: Japanese FDI in Laos, Cambodia and Myanmar still marginal.  
Source: UNTADC

Grafik 3 di atas menunjukkan bahwa investasi Jepang yang terbesar terdapat di Indonesia, yaitu 25% dari total investasi Jepang ke negara-negara ASEAN. Dalam lanskap regional, strategi kerja sama ekonomi Jepang dengan ASEAN diharapkan akan mendorong kemakmuran negara-negara Asia Tenggara, sementara di sisi lain, Jepang menggunakan ekonomi ASEAN sebagai tempat tujuan relokasi industrinya. Hubungan Asia Tenggara dengan Jepang semakin kuat dengan munculnya Cina sebagai kompetitor dan tujuan pasar besar ASEAN. Secara umum, kemunculan Cina juga mengubah hubungan perdagangan dan investasi internasional. Sekarang, hubungan bilateral Jepang-ASEAN beralih pada "Triad" Jepang-ASEAN-Cina. Sisi positif dari hubungan ini adalah akan terjadi perluasan pasar karena ASEAN dan Cina merupakan tujuan dari FDI dan merupakan sumber bahan-bahan mentah serta sumber daya manusia.<sup>20</sup>

Untuk meningkatkan hubungan ekonomi dengan ASEAN, maka dalam pertemuan menteri-menteri ekonomi ASEAN di Brunei September 2002, dibicarakan kerangka pembentukan *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) yang akan direalisasikan dalam waktu sepuluh tahun. Kemudian pada pertemuan pemimpin-pemimpin ASEAN pada bulan Nopember 2002 di Kamboja, mereka menandatangani kesepakatan AJCEP ini.<sup>21</sup>

Ada beberapa hal penting dalam agenda *AJCEP*, yaitu:<sup>22</sup>

### 1. Pengurangan batas-batas perdagangan, investasi, dan jasa

Pengurangan batas-batas perdagangan, investasi, dan jasa antara ASEAN dan Jepang akan meningkatkan pengembalian dan perluasan investasi di ASEAN, sehingga nantinya besarnya investasi yang ada di ASEAN sejajar dengan di kawasan lain. Di sisi lain, Jepang juga akan memperoleh keuntungan ekonomi dengan adanya ASEAN-Japan FTA. Ketika Jepang sepakat dengan ASEAN untuk mengurangi batas-batas perdagangan, investasi, dan jasa, maka tingkat pengembalian investasi di Jepang juga akan meningkat, dan akan semakin banyak modal yang masuk ke Jepang. Dampak tersebut akan benar-benar nyata apabila lingkungan kedua belah pihak mendukung perusahaan-perusahaan dalam memaksimalkan keuntungannya.

### 2. Penyelesaian pasar tunggal ASEAN

Untuk memaksimalkan dampak AJCEP, selain merealisasikan perdagangan bebas di kawasan, ASEAN juga harus memiliki komitmen membentuk pasar tunggal ASEAN dengan memajukan fasilitas kegiatan-kegiatan bisnis, seperti skema *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) yang akan mengurangi tarif di kawasan dibawah 5%. Enam anggota pertama ASEAN menerapkan ketentuan tersebut tahun 2003, sedangkan anggota yang baru akan mengikutinya. Vietnam akan melaksanakannya tahun 2006, Laos dan Myanmar tahun 2008, dan Kamboja tahun 2010. Untuk memperbesar keuntungan yang diperoleh dari AJCEP, maka ASEAN harus melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam CEPT sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

### 3. *Perbaikan struktur industri dalam ekonomi ASEAN*

Dalam pembentukan pasar tunggal, ekonomi ASEAN harus menekankan pada *competitiveness-enhancing policy*. Kebijakan ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan pengembangan teknologi dan keahlian, serta menciptakan lingkungan baru yang menguntungkan. Pembentukan *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* serta ASEAN-Japan FTA akan memasukkan beberapa prinsip mekanisme pasar ke dalam kebijakan industri ASEAN.

### 4. *Perbaikan struktur industri di Jepang*

Jepang telah melakukan berbagai macam perbaikan dalam institusi publik dan peraturan serta struktur perusahaan dan industri. Pada bulan Juni 2002, Dewan Pajak dan Ekonomi Jepang melakukan perbaikan dalam kebijakan pajak, anggaran belanja pemerintah dalam infrastruktur publik, kesejahteraan sosial, dan pemerintah lokal. Pada bulan April 2003, Jepang membuat undang-undang tentang revitalisasi industri serta daerah khusus untuk perbaikan struktural. Jepang harus menyelesaikan semua program ini secepat mungkin guna mendukung terealisasinya AJCEP.

### 5. *Pembuatan kebijakan lingkungan secara bersama-sama*

AJCEP memerlukan kebijakan lingkungan untuk mendukung kegiatan bisnis. Pemerintah Jepang dan ASEAN perlu bekerja sama memperbaiki *custom procedure*, aturan dan penyesuaian dalam perdagangan, hak kepemilikan intelektual, kebijakan kompetisi, aturan komunikasi, dan transportasi untuk menciptakan lingkungan yang kompetitif. Selain itu, Jepang akan memberikan bantuan teknis kepada ASEAN dan bekerja sama mengembangkan teknologi dan keahlian. Kerja sama lebih erat perlu diterapkan, terutama pada perusahaan kecil dan menengah, perbaikan sistem hukum, dan perbaikan kemampuan administratif pemerintah negara-negara ASEAN.

### 6. *Kerja sama keuangan dan pasar modal*

Terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 telah mendorong kerja sama keuangan yang lebih mendalam dalam kawasan, di antaranya mekanisme pengawasan ekonomi, koordinasi kebijakan makro-ekonomi, dan pengajuan mata uang Yen sebagai mata uang internasional yang penting di kawasan ASEAN.

### 7. *Membantu negara-negara anggota ASEAN yang baru*

Negara-negara ASEAN yang baru, memiliki pendapatan perkapita yang rendah dibandingkan dengan negara ASEAN lain, dan memiliki kekurangan dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi dan modal. Walaupun negara-negara CLMV (*Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam*) memiliki keunggulan dalam bidang pertanian dan industri berbasis pertanian, namun mereka belum mengembangkannya secara maksimal. Oleh karena itu, CLMV memerlukan bantuan teknis dan kerja sama ekonomi untuk pelaksanaan liberalisasi, dan sejak Nopember 2000, ASEAN telah membentuk *Initiative for ASEAN Integration (IAI)* yang menetapkan agar anggota ASEAN yang lama memberi bantuan kepada anggota yang baru. Tidak ketinggalan,

Jepang juga telah memberi bantuan bagi pengembangan sumber daya manusia negara-negara CLMV. Selama periode tahun 1980-an, Jepang membantu enam negara anggota pertama ASEAN melalui ODA bilateral, dan selama tahun 1990-an Jepang meningkatkan ODA bagi CLMV, baik di bidang infrastruktur maupun bantuan teknis.

### 8. Arah AJCEP

Sejajar dengan FTA bilateral dan ASEAN+3, Jepang mengharapkan AJCEP memainkan peranan sebagai katalis dalam menciptakan komunitas Asia Timur di masa yang akan datang.

### 1.3. FTA Jepang – Korea

Pada tahun 1999-2000, *The Korea Institute for International Economic Policy* (KIEP) dan *the Institute of Developing Economies* (IDE) di Jepang bekerjasama meneliti dampak yang ditimbulkan dari FTA Jepang-Korea. Dari kerjasama studi ini, mereka merekomendasikan kerjasama formal antara Jepang dan Korea, dan dalam pertemuan antara PM Jepang Mori Yoshiro dan Presiden Korea Kim Dae Jung bulan September 2000 di Atami, mereka membicarakan kerja sama bilateral dalam bidang teknologi informasi (IT). Dalam pembicaraan tersebut, Kim dan Mori sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi melalui pembentukan FTA dan perjanjian investasi. Untuk mewujudkan FTA, kedua pemimpin juga sepakat menetapkan *South Korea-Japan Business Forum*. Dalam FTA Korea-Jepang, kedua belah pihak diwajibkan menghapuskan tarif perdagangan.<sup>23</sup>

*Korea-Japan FTA Business Forum I* diadakan di Seoul bulan September 2001, dan pertemuan kedua diadakan di Tokyo, Januari 2002. Dalam pertemuan di Tokyo tersebut, para pelaku bisnis kedua negara bekerja sama meminta pemerintah mereka memikirkan pembentukan FTA Jepang-Korea. Ketika PM Jepang Koizumi Junichiro berkunjung ke Seoul bulan Maret 2002, Koizumi dan Presiden Kim Dae-Jung bersepakat membentuk *joint study panel*.<sup>24</sup> Dalam pertemuan yang sama, Presiden Kim membentuk forum bisnis Jepang-Korea yang bertujuan mendorong diskusi di antara komunitas bisnis di suatu negara mengenai keuntungan dan kerugian dari FTA. Kemudian, dua negara tersebut menandatangani "*Korean-Japan Bilateral Investment Treaty*".<sup>25</sup>

Menurut *Institute of Developing Economies* (IDE), meskipun Jepang dan Korea merupakan pemain utama dalam dunia perdagangan, FTA hanya akan menaikkan perdagangan dunia sebesar US\$ 5,82 milyar (0.10%). Meskipun demikian, FTA ini akan memberikan dampak besar bagi perdagangan bilateral melalui penghapusan hambatan perdagangan, baik yang bersifat tarif maupun non-tarif, dan pengurangan harga dalam pasar domestik dengan mengutamakan keunggulan komparatif. Aliansi strategis antara Jepang dan Korea dapat bersifat kreatif, dan penyatuan pasar Jepang-Korea juga dapat menarik perusahaan-perusahaan AS dan Eropa berinvestasi di kedua negara dalam jumlah besar.

Dalam penyatuan pasar Jepang-Korea kedua negara wajib menandatangani perjanjian perpajakan, persetujuan dalam hal penanaman modal, pengakuan terhadap standard dan sertifikasi, *Intellectual Property Right* (IPR) untuk memajukan standardisasi yang lebih luas atas prosedur penghapusan bea masuk dan implementasi langkah-langkah untuk memfasilitasi perdagangan dan pendapatan pemerintah.<sup>26</sup>

#### 1.4. FTA Jepang-Cina-Korea

Proposal yang tidak kalah pentingnya dalam pembentukan integrasi ekonomi di Asia Timur adalah ide membentuk FTA antara Cina, Jepang, dan Korea.<sup>27</sup> Perkembangan yang sangat penting dari hubungan Jepang-Cina-Korea terlihat dari adanya pertemuan tingkat tinggi pemimpin ketiga negara. ASEAN+3 *Summit Meeting* yang diadakan di Manila bulan Nopember 1999, merupakan *first historic meeting*. Selanjutnya, dalam pertemuan bulan Nopember 2000 di Singapura, pemimpin ketiga negara tersebut sepakat melakukan *three-way summit and annual event*.

Dalam *summit meeting* tersebut, pemimpin ketiga negara menyetujui beberapa proposal guna mewujudkan kerja sama trilateral. Berdasarkan kesepakatan yang dicapai di *Manila Summit Meeting*, Jepang, Cina, dan Korea berkomitmen melanjutkan kerja sama ekonomi. *The Development Research Center (DRC) of Cina, the National Institute for Research Advancement (NIRA) of Japan, dan the Korea Institute for International Economic Policy (KIEP)* bekerja sama membentuk suatu proyek penelitian. Laporan kerja sama tersebut serta rekomendasi kebijakan pembentukan "*Strengthening Trade Relations between Cina, Japan dan Korea*," dipresentasikan dalam *Brunei Summit Meeting* pada tanggal 5 Nopember 2001. Dari pertemuan tersebut, pemimpin ketiga negara sepakat membentuk semacam *regular meeting*, diantaranya *Economic Ministers' Meetings, Finance Ministers' Meeting, dan Foreign Minister's Meeting*.<sup>28</sup>

## 2. Sisi Keamanan

Pemerintah Jepang telah menyetujui *Self Defense Force* (SDF) memainkan peran dalam mencegah ancaman keamanan di Asia Timur, walaupun Jepang tidak dalam keadaan terancam. Secara khusus, Jepang ingin ikut serta dalam menjaga stabilitas keamanan di Selat Malaka. Lokasi strategis Asia Tenggara dalam *international waterways*, terutama selat Malaka dan Selat Lombok, yang merupakan jalur kapal tangki dan kapal kontainer yang akan ke Jepang maupun dari Jepang, membuat kawasan tersebut menjadi sangat penting. Ketidakstabilan politik serta *maritime crime* menjadi perhatian utama Jepang.<sup>29</sup> Untuk itu, Jepang memerintahkan angkatan laut SDF untuk berpartisipasi dalam memerangi pembajakan di wilayah Selat Malaka. Di sini terlihat bahwa Jepang mulai memainkan peran yang strategis sesuai dengan statusnya sebagai negara dengan kekuatan ekonomi yang besar.

Dalam *Maritime Security Conference* di Singapura pada bulan Mei 2004, delegasi Singapura mengundang *maritime patrols* kapal-kapal angkatan laut AS dan Jepang untuk lebih aktif bergerak di Selat Malaka. Atas ajakan Singapura pula, pada bulan Maret 2004, Admiral

Thomas Fargo, komandan Angkatan Laut (AL) AS untuk kawasan Pasifik, bersedia mengirimkan pasukan khususnya dalam bentuk pasukan *speed boats*, untuk mengatasi terorisme di laut, khususnya di Selat Malaka. Ide ini langsung ditentang oleh Indonesia dan Malaysia. Sedangkan untuk peran Jepang, tiga negara yaitu Singapura, Malaysia, dan Indonesia mempunyai pendapat yang sama. Mereka berpendapat bahwa impor minyak Jepang bergantung pada kondisi keamanan di wilayah Selat Malaka, oleh karena itu Jepang perlu memberikan kontribusi memelihara keamanan di wilayah tersebut. Indonesia maupun Malaysia berharap bantuan luar negeri Jepang dalam hal teknologi militer, seperti *satellite intelligence gathering* dan *maritime traffic monitoring*, dapat mengurangi ketergantungan terhadap AS.<sup>30</sup> Tetapi, dalam masalah anti-terorisme, SDF menyediakan *logistical support* bagi operasi militer AS. Pandangan yang menentang Jepang memainkan peranan militer secara aktif ini muncul, karena dianggap dapat mengganggu negara-negara tetangganya di Asia Timur. Negara-negara dalam wilayah tersebut masih mengingat kekejaman imperialis Jepang selama tahun 1920-an dan 1930-an, dan memberikan reaksi yang buruk terhadap segala bentuk manifestasi "Militerisme Jepang". Beberapa negara (seperti Korea Selatan) masih paranoid dengan Jepang. Begitu juga Cina, menentang peranan militer Jepang, tetapi keberatan ini sebenarnya merupakan sebuah *self-serving*, karena Cina menyadari bahwa peran Jepang yang aktif bisa menjadi hambatan utama bagi Beijing untuk menjadi kekuatan dominan di kawasan.<sup>31</sup>

Negara Asia Timur lainnya mulai menerima peran aktif Jepang dalam bidang keamanan. Sebagai contoh, di awal tahun 2002 Singapura memberi penawaran kepada Tokyo untuk menggunakan fasilitas angkatan lautnya. Hal ini merupakan pertanda bahwa Jepang tidak dipandang sebagai ancaman, dan menunjukkan awal pengakuan bahwa imperialisme Jepang sudah berakhir setengah abad yang lalu.<sup>32</sup>

Tabel Perdagangan Distribusi Ekspor Negara-negara Asia Timur tahun 2000  
Tabel 1

Export Countries	Share in total exports (%)					
	Japan	Cina	Korea	Hong Kong	ASEAN 5	East Asia 9
Singapore	7.5	3.9	3.6	8.0	27.3	50.2
Malaysia	13.0	3.1	3.3	4.5	25.5	49.4
Thailand	15.7	4.3	1.9	5.3	17.3	44.6
Indonesia	23.2	4.5	7.0	2.5	16.7	53.8
Philippines	14.5	2.5	3.0	4.5	13.5	38.1
ASEAN 5 <sup>2</sup>	13.3	3.7	3.7	5.5	22.1	48.4
ASEAN 4 <sup>1</sup>	16.3	3.6	3.8	4.2	19.6	47.5
Korea	11.0	11.8	-	5.9	9.1	37.8
Hong Kong	5.2	35.6	1.9	-	5.7	48.5
Japan	-	6.5	6.4	5.6	13.9	32.5
Cina	15.8	-	4.0	19.3	5.4	44.5
East Asia 9 <sup>3</sup>	8.3	8.9	4.0	7.4	12.9	41.5

Notes: 1. ASEAN 4 : Malaysia, Thailand, Indonesia, and Philippines  
2. ASEAN 5 : ASEAN 4 + Singapore  
3. East Asian 9 : ASEAN 5, Korea, Hong Kong, Japan, Cina

Source: IMF, Direction of Trade Statistics Yearbook, 2000.

Data di atas menunjukkan bahwa total ekspor Jepang ke ASEAN 5 sebesar 13,9%, dan ke Asia Timur sebesar 32,3%. Jika dibandingkan negara-negara Asia Timur lainnya seperti Hong Kong, Cina dan Korea, Jepang memiliki prosentase yang lebih kecil.

Sedangkan dalam interdependensi ekonomi di Asia Timur, berdasarkan *intra-regional exports/GDP ratio* (2000,%), Jepang memiliki prosentase terkecil. Hal ini terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2

Exporting Countries	Japan	Cina	ASEAN 5	NIEs	East Asia 9
Singapore	10.9	5.7	40.0	16.9	73.2
Malaysia	14.3	3.4	27.9	8.6	54.1
Thailand	8.4	2.3	9.2	3.9	23.8
Indonesia	9.4	1.8	6.7	3.8	21.8
Philippines	14.6	2.5	13.5	4.3	21.8
Korea	4.1	4.3	3.3	2.1	13.8
Hong Kong	6.3	12.3	6.9	2.3	20.9
Japan	-	0.7	1.4	1.2	3.3
Cina	4.1	-	1.4	6.0	11.4

Notes : NIEs : Korea, Hong Kong

ASEAN 5, East Asia 9: see notes of table 1

Source : IMF, Direction of Trade Statistic Yearbook 1997

### Kepentingan Jepang dalam Pembentukan Masyarakat Ekonomi Asia Timur

Beberapa faktor yang mempengaruhi kebijakan Jepang dalam pembentukan beberapa FTA di wilayah Asia Timur: *Pertama*, Asia Timur merupakan wilayah yang sangat penting bagi Jepang. Ini dapat dilihat dari impor Jepang dari Asia Timur yang meningkat dari 26% di tahun 1990 menjadi 34%, lebih besar dibandingkan Amerika dan EU sebesar 25% dan 14%. *Kedua*, adanya harapan bahwa FTA dapat meningkatkan perekonomian Jepang, karena melihat pengalaman EU dan NAFTA –sebagai contoh integrasi regional— yang dapat menciptakan ekonomi nasional yang semakin dinamis. *Ketiga*, para pemimpin bisnis Jepang berpendapat, tidak ikutnya suatu negara dalam integrasi regional merupakan salah satu bentuk kekurangan negara tersebut.<sup>33</sup>

Jepang tertarik membentuk beberapa FTA di Asia Timur untuk memajukan pertumbuhan ekonominya dengan cara mengalokasikan perbaikan ekonomi dan efisiensi melalui perdagangan bebas dan reformasi kebijakan. Diharapkan, dampak ini dapat dirasakan juga oleh negara-negara yang menjadi partner Jepang dalam FTA. Strategi Jepang dalam membentuk FTA dapat digambarkan sebagai “*having a magnificent grand design, an urgent necessity and a very political basic feature.*”<sup>34</sup> Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di negara-negara Asia Timur, tidak hanya memberikan kontribusi terhadap kemakmuran ekonomi serta stabilitas sosial dan politik di kawasan, tetapi juga memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi Jepang.

Langkah-langkah pendekatan ke kawasan Asia Timur seperti ini juga dilakukan Cina dengan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara dalam satu kawasan. Dewa Made Sastrawan dalam tulisannya berpendapat<sup>35</sup> bahwa terdapat tiga pertimbangan yang mendorong Jepang dan Cina melembagakan kerja sama ekonominya dengan negara-negara ASEAN, yaitu: 1) adanya peningkatan hubungan saling ketergantungan di antara negara-negara dalam satu kawasan. Dalam hal ini suatu negara akan cenderung mengurangi tarif bea masuk yang ditujukan untuk memfasilitasi percepatan arus barang dagangannya, guna menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. 2) sebagai upaya untuk melakukan perubahan struktural yang merupakan akibat dari berubahnya tatanan perekonomian internasional. Proses globalisasi ekonomi yang semakin meningkat, mengakibatkan negara-negara semakin sulit menarik investasi asing dan menjaga daya saing produk-produk eksportnya. Untuk itu diperlukan kerja sama, terutama melalui kerja sama regional, guna mengatasi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi.

Pertimbangan Jepang dan Cina melembagakan kerja sama regional didasarkan juga pada keinginan menjadi pemimpin di kawasan, sehingga ASEAN menjadi arena perebutan kepemimpinan dalam pembangunan ekonomi kawasan. Ada kekhawatiran yang dihadapi Jepang atas menurunnya pengaruh negara itu di ASEAN, sebagai akibat dari meningkatnya dialog ASEAN-Cina. Kekhawatiran itu dapat dilihat dari penandatanganan *Joint Declaration on the Comprehensive Economic Partnership (JDCEP)*, yang dilakukan sehari setelah kepala pemerintahan ASEAN dan PM Cina menandatangani *Framework Agreement on ASEAN-China Free Trade Agreement* pada tanggal 4 Nopember 2002.<sup>36</sup>

Dalam *East Asian Strategic Review* edisi 2003, juga dikatakan bahwa sejak terjadinya krisis Asia pada tahun 1997, kepemimpinan Jepang di kawasan semakin berkurang sebagai akibat resesi ekonomi dan kegagalan *Asian Monetary Fund (AMF)*. Cina, disisi lain, berusaha memperkuat posisinya dengan meyakinkan ASEAN bahwa Cina tidak akan mendevaliasi mata uangnya, untuk menghindari penurunan nilai mata uang negara-negara ASEAN. Sementara Jepang mengusulkan *New Miyazawa Initiative* yang menjanjikan bantuan 30 milyar dolar ke negara-negara Asia Tenggara pada tahun 1998, seperti juga dengan *Obuchi-ASEAN Initiative* yang diprakarsai oleh mantan perdana menteri Obuchi Keizo. Jepang memperkuat posisinya di Asia Tenggara dengan memberikan bantuan finansial untuk mempercepat pemulihan ekonomi negara-negara yang terkena krisis.<sup>37</sup>

Selain faktor-faktor di atas tadi, ada faktor lain yang juga digunakan dijadikan alasan mengapa Jepang meningkatkan hubungan ekonominya dengan negara-negara di Asia. Jepang merupakan negara industri yang mengimpor sumber-sumber bahan mentah industri dari negara lain. Selain minyak mentah, baja, dan besi, Jepang harus mengimpor logam, air raksa, batu kawi, timah, dan khrom dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, nikel, kobalt, dan bauksit tidak ditambang di Jepang, dan mineral non-metalik seperti batu fosfat, magnesit harus diimpor dalam jumlah besar pula. Begitu juga dengan fiber alami seperti katun, dan wool juga didapatkan melalui impor. Ekonomi Jepang pada prinsipnya tergantung pada perdagangan, dan tidak tersedianya sumber-sumber industri

tentu akan membuat mekanisme industri menjadi kacau. Oleh karena itu, motif utama para pembuat keputusan di Jepang berpusat pada usaha mendapatkan bahan-bahan mentah dan mendorong perdagangan dengan negara lain. Impor minyak dan gas cair dari negara-negara ASEAN terutama Malaysia, Indonesia dan Singapura sangat penting bagi Jepang. Pada tahun 1981, 1982, dan 1983, ekspor bahan bakar Indonesia ke Jepang mencapai 89, 89, dan 87 persen dari total ekspor minyak Indonesia. Untuk Malaysia proporsi ekspor minyak pada tahun yang sama ke Jepang adalah 38, 33, dan 36 persen, sedangkan Singapura mencapai 77, 80, 74 persen dalam periode yang sama. Disini terlihat bahwa perkembangan industri di Jepang tergantung pada suplai bahan-bahan mentah dari ASEAN. Sementara disisi lain, ASEAN melihat Jepang sebagai penyedia industri berat dan produk-produk bahan kimia, selain sebagai mitra dagang yang sangat penting.<sup>38</sup>

### Penutup

Interdependensi di wilayah Asia Timur semakin besar terutama dengan adanya arus perdagangan dan arus investasi yang semakin meningkat. Dengan adanya fenomena seperti ini, Jepang lebih menjadi salah satu kontributor utama daripada pesaing negara-negara Asia Timur. Bagi pihak Jepang sendiri, perkembangan ekonomi di Asia Timur akan memberikan dampak positif bagi negaranya. Bagi Jepang, hal ini merupakan "*window of opportunity*" untuk mendapatkan peran sebagai pemimpin dalam mendorong terjadinya kerjasama dan membentuk masa depan ekonomi Asia Timur.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi regionalisme di Asia Timur, diantaranya (a) proses liberalisasi yang lambat di bawah WTO. Negara-negara kuat seperti AS dan EU lebih mendominasi agenda-agenda WTO, (b) adanya perkembangan *free trade area* di dunia, seperti perluasan keanggotaan Uni Eropa dan perkembangan NAFTA (North American Free Trade Agreement) yang diusulkan menjadi *Free Trade Areas of the Americas* (FTAA). Fenomena ini merupakan pendorong terbentuknya *free trade area* di berbagai belahan dunia, (c) krisis finansial di Asia.

Fenomena regionalisme di Asia Timur menjadi semakin marak dengan adanya kesepakatan membentuk integrasi ekonomi baru dalam bentuk FTA. Dari beberapa FTA yang dibentuk Jepang, dapat dilihat bahwa Jepang meningkatkan kerjasama ekonomi dengan negara yang bersangkutan dengan membentuk suatu lembaga. Fenomena semacam ini sama dengan yang digambarkan oleh pendekatan *neo-liberal institutional*, yaitu kerja sama internasional yang ada secara fundamental dilembagakan guna memperoleh keuntungan yang maksimal.

Krisis keuangan yang terjadi di Asia menyadarkan bangsa-bangsa di wilayah tersebut akan perlunya interdependensi ekonomi dan kerja sama regional. Krisis ini memberikan dampak yang cukup berarti bagi para pembuat keputusan di Jepang. Mereka mengakui adanya interdependensi antara Jepang dengan beberapa negara di Asia, yang terlihat ketika Jepang mengajukan usul pembentukan AMF untuk membantu mengatasi krisis

Asia. Langkah-langkah yang dilakukan Jepang dalam rangka menyelesaikan atau mencari solusi atas krisis Asia, diantaranya adalah dengan dibentuknya FTA. Oleh karena itu, Jepang dapat dikatakan sebagai salah satu *trend setter* dalam penyelesaian krisis regional Asia dan pemikir ide pembentukan masyarakat ekonomi Asia Timur.

Dari fenomena di atas dapat diprediksikan bahwa ekonomi Jepang pada masa yang akan datang akan semakin terlibat dalam integrasi ekonomi Asia Timur. Kemungkinan besar dapat terjadi bahwa Jepang akan memainkan peranan utamanya dalam memberikan arah atau petunjuk baru dalam hal ekonomi, seperti perbaikan nilai mata uang, blok-blok perdagangan dan bentuk lain integrasi. Mengenai kompetisinya dengan Cina dalam memperebutkan peran yang besar dalam perekonomian di kawasan, hal ini dapat dilihat sebagai salah satu fenomena yang mewarnai usaha meningkatkan kemakmuran bersama di dalam satu kawasan.

Kepentingan nasional Jepang pada integrasi ekonomi di Asia Timur dapat dilihat dari beberapa aspek baik ekonomi, politik, maupun keamanan. Dari kepentingan ekonomi, pembentukan "Masyarakat Asia Timur" memungkinkan Jepang meningkatkan pertumbuhan ekonomi domestiknya, maupun negara-negara yang terlibat di dalamnya. Selain itu, Jepang akan dapat mendorong terciptanya institusi ekonomi regional untuk menjaga kestabilan ekonomi kawasan dan mendorong pembangunan di Asia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran bersama. Upaya Jepang meningkatkan eksportnya dapat dilakukan mengingat ada perbedaan teknologi yang cukup besar, namun tidak menjamin Jepang dapat menurunkan impornya. Sebagai dampaknya, relokasi industri, akses bahan mentah, dan perluasan daerah investasi yang dilakukan Jepang akan membantu mengembangkan perekonomian CMLV.

Dalam hal kepentingan politik, Jepang akan berusaha memberikan pengawasan terhadap pembangunan Asia melalui ODA dan berbagai bantuan teknis. Untuk menguatkan ekonominya, Jepang juga akan mempromosikan Yen sebagai mata uang internasional di kawasan. Terakhir, keberadaan Jepang sebagai salah satu anggota "Masyarakat Asia Timur" akan sedikit banyak mengubah pola hubungan Jepang-AS. Dalam bidang keamanan, Jepang tampaknya juga akan memanfaatkan dinamika ke arah integrasi regional di kawasan Asia itu untuk menepis kekuatiran negara-negara di kawasan mengenai kebangkitan kembali militerismenya. Satu hal yang patut dicatat, meskipun dapat meningkatkan hubungan baiknya dengan ASEAN, tidak berarti upaya Jepang dalam memperluas pengaruhnya di kawasan tidak mendapat tantangan dari Cina.

### Catatan Belakang

<sup>1</sup> Syamsul Hadi, "Menimbang Wacana Unifikasi Asia", dalam *Kompas*, 30 Juli 2004.

<sup>2</sup> Peter Drysdale, *Japan and East Asia: Economic Prospects and Challenges*, diakses dari [http://www.globalmovements.monash.edu.au/docs/Peter\\_Drysdale.doc](http://www.globalmovements.monash.edu.au/docs/Peter_Drysdale.doc)

- <sup>3</sup> Zhang Yunling, *East Asian Cooperation: Progress and Future*, World Affairs Press, 2003, hlm.80.
- <sup>4</sup> Anne L. Emig, *Japan's Leadership in Asia*, diakses dari <http://www.aasianst.org/absts/1996abst/japan/j75.htm>
- <sup>5</sup> Tsutomu Kikuchi, *East Asian Regionalism: A Look at the "ASEAN plus Three" Framework*, Japan Review of International Affairs, Volume 16, Number 1, Spring, 2002, hlm. 27.
- <sup>6</sup> Mare Castellano, *Japan's Foreign Aid Program in the Millenium Rethinking "Development"*, diakses dari <http://www.jei.org./archive/JEIR00/0006f.html>, tgl 28 Juni 2004, pk. 20.00.
- <sup>7</sup> Joseph E. Stiglitz, *Globalization and Its Discontents*, W.W. Norton and Company, New York, 2002, hlm. 104.
- <sup>8</sup> Tsutomu Kikuchi, *op.cit.*
- <sup>9</sup> *Ibid.*
- <sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.28.
- <sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.30.
- <sup>12</sup> Lawrence J. Lau, *The Impact of Economic Development of East Asia, Including Cina, on Japan*, Keio-RIETI Conference on Japanese Economy: Leading East Asia in The 21 st Century?, Keio University, Tokyo, 30 Mei 2003.
- <sup>13</sup> Edward P.Consolati, *Trade Patterns: Japan's Trade With East Asia*, diakses dari <http://www.static.ncss.org/trade.html>, tgl 22 Mei 2004, pk. 10.00.
- <sup>14</sup> Shujiro Urata, *Regionalisation in East Asia and Japan's FTA Strategies*, 25 may 2003, Phuket, Thailand, diakses dari [http://www.pecc.org/publications/papers/trade-papers/5\\_cp/2-urata.pdf](http://www.pecc.org/publications/papers/trade-papers/5_cp/2-urata.pdf), hlm. 9, tgl 25 Juni 2004, pk. 19.00.
- <sup>15</sup> *Ibid.*
- <sup>16</sup> *East Asian Strategic Review 2003*, The National Institute for Defense Studies, Japan, 2003, hal. 211.
- <sup>17</sup> *East Asian Strategic Review 2003*, The national Institute for Defense Studies, Japan, 2003, hlm.211.
- <sup>18</sup> Yorizumi Watanabe, *Free Trade Agreements and Japan's Trade Strategy*, Japan Review of International Affairs, Volume 16, Number 4, Winter 2002, hlm.296.
- <sup>19</sup> *Making ASEAN as a Close Partner: Comparing Cina and Japan*, diakses dari <http://www.jetro.go.jp>, 19 Mei 2004, pk. 18.00.
- <sup>20</sup> Dr. Kitti Limskul, *Japan-ASEAN Comprehensive Economic Partnership, Towards The Establishment of East Asia*, diakses dari [http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/extxsg2czzzstc2lpqpeukinwegrole6vxfqzmau5omk4ilhsm6x6cjk2r5mm2v34jsbhno77lj6ko7p6mkclseka/Working\\_Paper\\_No\\_171.PDF](http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/extxsg2czzzstc2lpqpeukinwegrole6vxfqzmau5omk4ilhsm6x6cjk2r5mm2v34jsbhno77lj6ko7p6mkclseka/Working_Paper_No_171.PDF), tgl 15 Juni 2004, pk.20.00.
- <sup>21</sup> *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Vision and Tasks Ahead*, ASEAN-Japan Research Institute Meeting, 22 Juli 2003, hlm. 1.
- <sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.4
- <sup>23</sup> Tony Allison, *Tokyo, Seoul Move to Bury Trade hatchet*, diakses dari <http://www.atitimes.com/reports/CA27Ai01.html>, tgl 22 Juni 2004, pk. 19.00.
- <sup>24</sup> Zhang Yunling, *op.cit.*, hlm.133.

- <sup>25</sup> Kim Kihwan, *New Trends Towards Preferential Trade Arrangments in East Asia: An Unmixed Blessing*, diakses dari <http://www.keia.com/submitted/New Trensds-Kihwan Kim.doc>, tgl 1 Juni 2001, pk.20.00.
- <sup>26</sup> Tony Allison, *op. cit.*
- <sup>27</sup> Zhang Yunling, *op.cit.*, hlm.134.
- <sup>28</sup> *Ibid.*, hal 135.
- <sup>29</sup> Mohamed Jawhar Bin Hassan, *ASEAN's Political and security Relations with Japan*, diakses dari [http://www.jcie.or.jp/thinknet/pdfs/asean\\_jawhar.pdf](http://www.jcie.or.jp/thinknet/pdfs/asean_jawhar.pdf)., tgl. 26 Juli 2004 pk. 17.00, hlm.146
- <sup>30</sup> Yoichiro Sato, *U.S. and Japan in the Malacca Strait: Lending hands, Not Stepping In*, diakses dari [http://www.glocom.org/debates/20040713\\_sato\\_us/index.html](http://www.glocom.org/debates/20040713_sato_us/index.html), tgl 26 Juli 2004, pk. 17.00.
- <sup>31</sup> Ted Galen Carpenter, *Japan Takes a Modest Step toward Global Security*, diakses dari <http://www.cato.org/dailys/01-08-02.html>, tgl. 25 Mei 2004, pk. 19.00.
- <sup>32</sup> *Ibid.*
- <sup>33</sup> Yorzume watanabe, *op.cit.*
- <sup>34</sup> Tatsuhiko Yoshizaki, *East Asia Economic Community and Future Development of FTA Policies*, diakses dari <http://tameike.net/pdfs2/taiwan.PDF> , tanggal 17 Juni 2004, pk. 19.00
- <sup>35</sup> KOMPAS, 21 Nopember 2002
- <sup>36</sup> *Ibid.*
- <sup>37</sup> *East Asian Strategic Review 2003*, hlm. 209.
- <sup>38</sup> Lim Hua Sing, *Japan's Role in ASEAN, Issues and Prospects*, Times Academic Press, Singapore, 1994, hal.120.

